

BAB I

PENDAHULUAN

Problematika di dalam hubungan bilateral menurut penulis merupakan salah satu obyek yang menarik untuk dikaji. Segala tindakan dan kebijakan luar negeri yang di terapkan oleh tiap negara bisa mendapat respon positif ataupun negatif dari pemerintahan ataupun kelompok (organisasi) di negara itu maupun dari negara lain. Hal ini merupakan kondisi dimana suatu kebijakan yang merupakan “sebab” mendapat respon dari masyarakat ataupun negara lain yang kemudian menimbulkan suatu “akibat”.

Dalam hubungan internasional, sering ditemukan situasi sebuah negara membuat kebijakan dalam/luar negeri guna merespon satu kebijakan dalam/luar negeri negara lain. Bahkan kebanyakan kebijakan yang menjadi respon lebih bersifat menekan terhadap kebijakan yang dikeluarkan lebih dulu oleh negara lain. Situasi ekonomi dan militer negara pembuat kebijakan serta posisi strategis mereka dalam berbagai organisasi internasional mempunyai peranan penting terhadap kuat atau lemahnya tekanan yang timbul dari kebijakan tersebut.

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hubungan bilateral yang terjadi antara Amerika Serikat – Kuba ada hal unik dan menarik yang membuat penulis tergerak untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan di antara kedua negara ini dan kemudian mengusung judul “**Prospek Hubungan AS – Kuba Pada Masa Pemerintahan Barack Obama**”

menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan di jenjang pendidikan S1 yang sekarang sedang penulis tempuh.

Kuba yang terletak di kepulauan Antiles di benua Amerika dahulunya merupakan sebuah negara jajahan Spanyol. Amerika Serikat yang khawatir terhadap keamanan negara dan ketentraman regional benua Amerika dari gangguan negara-negara Eropa berusaha untuk mendekati pemerintahan Kuba. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat karena Kuba dapat menjadi pintu masuk bagi bangsa asing untuk menjelajah jauh ke daratan benua Amerika. Selain faktor pertahanan tersebut, Amerika Serikat juga mencoba untuk mengendalikan perekonomian Kuba yang pada saat itu merupakan penghasil gula terbesar kedua setelah Brasil dengan menampung hasil produksi gula Kuba untuk dipasarkan di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan negara dan benua mereka dari invasi Eropa.

Tindakan nyata yang pertama kali dilakukan dalam upaya membantu Kuba adalah intervensi militer Amerika Serikat dalam perang *Cuban-American-Spain*. Mencoba untuk menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap tetangga yang sedang berupaya merebut kemerdekaan dari Spanyol, pemerintahan Amerika Serikat mengirim bantuan berupa 17.000 tentara mereka ke Kuba.¹ Selama tiga bulan peperang bergulir, akhirnya gabungan kekuatan tentara Kuba dan Amerika Serikat berhasil membuat Spanyol menyerah.

Pasca kemenangan atas Spanyol, Amerika Serikat mengendalikan politik Kuba baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Selain itu, Amerika

Serikat juga mendominasi perekonomian negara tersebut. Tahun 1934 sampai 1958 Kuba menjadi tempat strategis bagi para investor dan turis Amerika Serikat. Hubungan baik yang terkesan spesial tersebut membawa keuntungan besar bagi pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 1958 tercatat bahwa Kuba merupakan lahan investasi terbesar kedua bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat khusus kawasan Amerika Latin. Kuba mengirim 71 persen barang ekspor mereka dan 64 persen dari barang impor Kuba berasal dari Amerika Serikat.² Hubungan baik ini hancur pasca revolusi penggulingan rezim Fulgencio Batista yang kebijakan politiknya terlalu memihak Amerika Serikat. Keretakan hubungan yang terjadi antar kedua negara tidak terjadi begitu saja tanpa adanya satu penyebab. Pada awalnya, pemerintahan revolusi Kuba yang dipimpin oleh sosok kharismatik Fidel Castro ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dia bukanlah seorang pemimpin yang anti kapitalisme, tetapi respon negatif yang didapatnya saat melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden Kuba ke Amerika Serikat membuat dirinya bersikap tegas dan berpaling ke Uni Soviet yang pada saat itu juga merupakan salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat. Kebijakan Kuba untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet inilah yang kemudian memicu keretakan hubungan kedua negara.

Tanggal 3 Januari 1961 Amerika Serikat resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Tidak hanya itu, berbagai upaya dilakukan Amerika Serikat sebagai wujud penolakan rezim Fidel Castro salah satu diantaranya adalah menghimbau presiden Ekuador Josh Maria Velasco Ibarra untuk memutuskan

hubungan diplomatik dengan Kuba sebagai satu persyaratan persetujuan dari berbagai pinjaman Ekuador kepada Amerika Serikat.³

Sejak tahun 1959 sampai 2009, Amerika Serikat telah melakukan pergantian presiden sebanyak 10 kali. Akan tetapi situasi ini tidak banyak merubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba. Kebanyakan dari pemimpin Amerika Serikat tetap meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Hal ini menjadi alasan utama penulis memilih judul "**Prospek Hubungan AS – Kuba Pada Masa Pemerintahan Barack Obama**".

B. Latar Belakang Masalah

Hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Kuba telah terjadi sejak abad ke-19. Pada saat itu, Kuba masih merupakan negara koloni Spanyol. Amerika Serikat menjalin kerjasama perdagangan dengan mengimpor hasil pertanian Kuba. Dekatnya jarak antara kedua negara semakin memudahkan proses terjadinya perdagangan. Akan tetapi banyak pengamat berpendapat bahwa dibalik hubungan tersebut Amerika Serikat mempunyai maksud tersembunyi demi memenuhi kepentingan nasional mereka. Kuba yang sejak tahun 1868 telah memulai melakukan pergerakan dengan tujuan mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol tidak terlalu terpengaruh mengenai pandangan yang timbul dari berbagai kalangan mengenai kecenderungan intervensi Amerika Serikat tersebut.

Sejak berbagai upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Kuba, intensitas perdagangan antara Spanyol – Kuba

³Artikel *Timetable History of Cuba: After The Revolution*, dalam <http://www.historyofcuba.com/history/time/timeth14.htm> diakses tanggal 23 Agustus 2009

mengalami kemerosotan. Kuba lebih mengedepankan kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat dengan mengirim 62% hasil pertaniannya untuk di ekspor ke Amerika Serikat dan hanya 3% untuk Spanyol. Berawal dari kerjasama perdagangan tersebut, Amerika Serikat dan Kuba terus menjalin hubungan baik hingga akhirnya pada tahun 1898 Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan intervensi atas perang kemerdekaan Kuba terhadap Spanyol.

Pada tanggal 15 Februari 1898 kapal perang Amerika Serikat U.S.S. *Maine* yang ditugaskan untuk melindungi properti Amerika Serikat meledak secara misterius di pelabuhan Havana. Situasi ini menjadi pemicu bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengibarkan bendera perang terhadap Spanyol karena diduga kuat pelaku peledakan tersebut adalah militer Spanyol. Menyikapi hal tersebut, pada bulan Juni 1898 Amerika Serikat mengirim 17.000 tentara mereka untuk bergabung bersama pejuang Kuba dalam perang melawan Spanyol. Dengan keadaan pasukan yang letih dan lemah, Spanyol berhasil ditundukkan dengan cepat pada akhir Juli.⁴

Sebelum peperangan mengusir Spanyol dari daratan Kuba terlaksana yakni tepatnya pada tanggal 19 April 1898, Amerika Serikat dan Kuba telah menyetujui satu kesepakatan yang tertuang dalam *Teller Amendment* (Amandemen Teller). Senator Henry M. Teller yang mengusulkan Amandemen ini ingin memastikan rakyat Kuba bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil kontrol permanen atas Kuba dan akan menarik seluruh pasukan mereka setelah perang melawan Spanyol berakhir. Akan tetapi setelah kepergian Spanyol dari Kuba, Amerika Serikat

melakukan perubahan yang kontroversial. Mereka menghapus Amandemen Teller untuk kemudian diganti dengan *Platt Amendment* (Amandemen Platt) yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang perubahan rencana penarikan tentara Amerika Serikat di Kuba dan syarat-syarat hubungan Amerika Serikat – Kuba hingga tahun 1934. Perubahan ini memastikan keterlibatan Amerika Serikat dalam hal penetapan kebijakan pemerintah Kuba baik luar negeri maupun dalam negeri, penguasaan atas perekonomian dan memberi klaim tanah (*legal standing teritori*) militer pada beberapa pulau di Kuba termasuk teluk Guantanamo yang dijadikan sebagai pangkalan angkatan laut Amerika Serikat dan tempat pengangkutan batu bara.

Meskipun banyak aksi penolakan atas Amandemen Platt melalui unjuk rasa ataupun penolakan resmi pada Konvensi Konstitusi Kuba, rakyat Kuba tidak dapat berbuat lebih. Amandemen yang telah disepakati pada Konvensi Konstitusi Kuba tetap diterapkan oleh Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kebencian sebagian rakyat Kuba terhadap Amerika Serikat terutama rakyat kecil yang merasa tersingkirkan karena banyaknya penguasaan tanah pertanian milik mereka untuk kemudian dikelola oleh para investor dari Amerika Serikat.

Berbagai kontroversi di dalam hubungan AS – Kuba terus terjadi. Sepanjang sejarah hubungan kedua negara, rakyat Kuba sering melakukan pemberontakan demi mencari kedaulatan yang hakiki atas kemerdekaan negara mereka tanpa adanya campur tangan lagi dari pemerintahan Amerika Serikat ataupun negara lain. Akhirnya pada tahun 1959 pecah sebuah revolusi Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro Ruz yang berhasil meniatuhkan rezim kediktatoran

Fulgencio Batista yang dianggap terlalu berpihak kepada pemerintahan Amerika Serikat.

Pasca revolusi, Fidel Castro menjadi orang nomor satu di Kuba. Di bawah pemerintahannya, hubungan Amerika Serikat – Kuba mulai memburuk. Banyak pabrik-pabrik maupun perusahaan yang didirikan oleh Amerika Serikat dinasionalisasi oleh pemerintahan Fidel Castro. Kehilangan *power* atas daratan Kuba juga berarti kehilangan satu poin kepentingan dalam negeri Amerika Serikat atas Kuba, dan hal ini merupakan titik awal pembatasan hubungan antara Amerika Serikat – Kuba.

Sejak berakhirnya revolusi Kuba sampai pada saat berakhirnya masa jabatan George W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat, hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat – Kuba tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hanya terdapat beberapa perubahan kecil yang belum mampu untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan kerjasama antar kedua negara.

Pada 20 Januari 2009, Barack Obama resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-44. Presiden kulit hitam pertama bagi Amerika Serikat yang berasal dari keturunan Afrika-Amerika ini benar-benar menarik perhatian dunia internasional mulai dari masa kampanye hingga keberhasilannya mengungguli John McCain sebagai calon presiden dari Partai Republik. Popularitas Barack Husein Obama meningkat drastis. Banyak yang menanti perubahan-perubahan yang akan di bawa Obama melalui kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selalu dia suarakan selama periode kampanyenya, terutama kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba.

Pada kasus hubungan Amerika Serikat – Kuba, presiden terpilih Barack Obama menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara tetangga yang menganut sistem pemerintahan Komunis tersebut. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Amerika Serikat mencabut pembatasan larangan kunjungan dan pengiriman uang ke Kuba bagi warga Kuba-Amerika. Rakyat Kuba menyambut baik kebijakan tersebut. Timbul harapan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah awal untuk bisa menjembatani keretakan hubungan diplomatik kedua negara.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis eksplorasi di atas, maka rumusan masalahnya adalah: *“Bagaimanakah Prospek Hubungan AS – Kuba Pada Masa Pemerintahan Barack Obama”*.

D. Teori yang digunakan :

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional. Karena hal itulah yang mendorong terciptanya sebuah kebijakan luar negeri. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

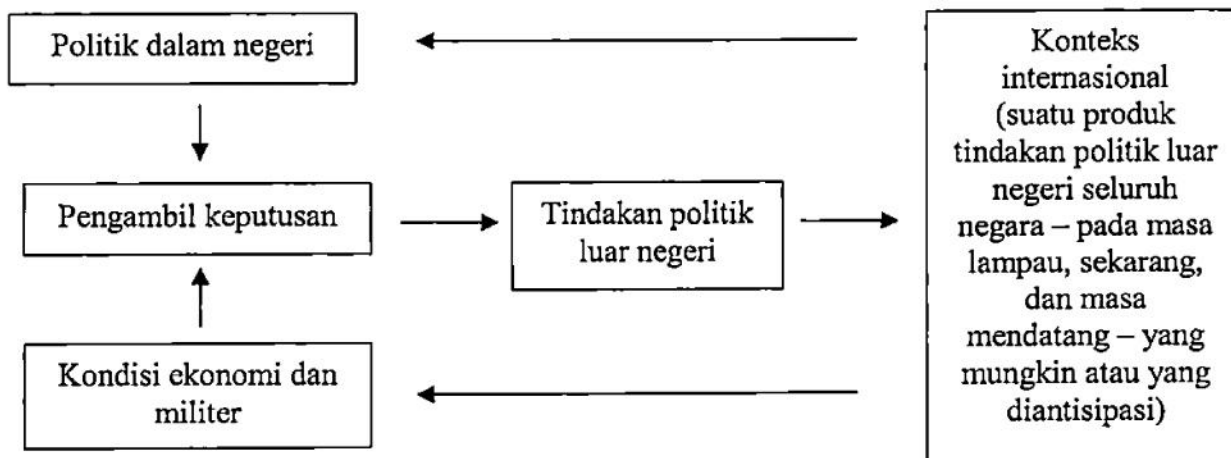
*Foreign Policy is strategy of plan course of actions developed by decisions makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest.*⁵(Politik luar negeri adalah sebuah strategi perencanaan dalam tindakan-tindakan yang dikembangkan oleh para

⁵Jack C Plano & Roy Olton, *The International Politic Dictionary*, HOLT Rine Hart, Winson Inc. Michigan University, New York, 1973, h. 127

pembuat kebijakan sebuah negara terhadap maksud negara lain atau dunia internasional untuk mencapai tujuan tertentu demi mendefinisikan kepentingan nasional.

*The fundamental objective ultimate determinant that guides the decisions maker of a state in making foreign policy, the national interest of a state is typical a highly generalized conceptions of these element that constitute to the state most vital need, there include self preservations, independence, teritorial integrity, military security and economic well being.*⁶(Tujuan mendasar yang menjadi penentu utama dalam memandu pembuat kebijakan sebuah negara dalam membuat kebijakan luar negeri, kepentingan nasional sebuah negara merupakan konsep khas yang sangat umum dari elemen ini yang merupakan kebutuhan negara yang paling vital, termasuk pemeliharaan sendiri, kemerdekaan, integritas teritori, keamanan militer, dan kestabilan ekonomi.)

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses dimana ada tuntutan dari *domestic politics*, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya sehingga menjadi sebuah kebijakan luar negeri, dalam merespon situasi internasional.



Sumber: William D. Coplin, Drs. Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis, hal. 30

Pada kasus hubungan Amerika Serikat – Kuba salah satu kebijakan yang timbul akibat dari tekanan dalam negeri Amerika Serikat adalah mengenai pembatasan kunjungan dan larangan pengiriman uang yang merupakan rangkaian dari sanksi embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Kebijakan baru Amerika Serikat mengenai penghapusan larangan berkunjung serta pembatasan pengiriman uang ke Kuba tersebut merupakan efek dari tekanan rakyat Amerika Serikat pada khususnya yang menganggap bahwa larangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Tekanan yang diberikan oleh mayoritas rakyat Amerika Serikat mengenai penghapusan larangan berkunjung serta pembatasan pengiriman uang ke Kuba masuk sebagai *input* politik dalam negeri Amerika Serikat. *Input* ini kemudian diproses oleh pemerintahan Barack Obama yang semasa Kampanyenya selalu menyuarakan perubahan hubungan Amerika Serikat – Kuba menuju kearah yang lebih baik.

Bersamaan dengan kebijakan penghapusan larangan bepergian dan pembatasan pengiriman uang ke Kuba tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mencoba untuk membuka kembali hubungan kerjasama pada bidang telekomunikasi. Kedua kebijakan digabungkan dalam satu rangkaian kebijakan *Reaching Out Cuban People*.

Dengan penggabungan kedua kebijakan ini, selain dapat memenuhi tuntutan dalam negeri dari rakyat Amerika Serikat mengenai penghapusan larangan bepergian dan pembatasan pengiriman uang ke Kuba, pemerintah Amerika Serikat memandang bahwa dengan terjalinnnya kerjasama telekomunikasi tersebut maka

mereka dapat lebih mudah untuk memantau perkembangan pemerintahan Kuba yang sampai saat ini belum juga bersedia untuk menegakkan demokrasi di negara tersebut. Kepentingan penegakan demokrasi di Kuba merupakan upaya yang sudah sejak lama diusahakan oleh pemerintahan Amerika Serikat dan selalu mendapat penolakan dari rezim revolusi Kuba. Selain itu, dengan penggabungan kedua kebijakan tersebut, dari segi ekonomi Amerika Serikat berkepentingan untuk menambah pemasukan devisa negara mereka dengan beroperasinya jaringan telekomunikasi yang mereka bangun.

Mengenai kepentingan penegakan demokrasi di Kuba, sejak awal abad ke-19 sasaran utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Amerika Latin bertumpu pada upaya untuk tetap memelihara belahan bumi bagian barat tersebut agar tetap menjadi wilayah dominasi Amerika Serikat dan mewujudkan demokratisasi di kawasan tersebut. Upaya dominasi terhadap Amerika Latin tidak hanya karena motivasi imperialisme atau eksploitasi ekonomi, akan tetapi lebih jauh karena keyakinan yang kuat, ketentuan dari para pendiri bangsa, mitos kritis yang masih tersisa dari politik Amerika Serikat bahwa keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat sangat tergantung pada kebijakan ideologi politik luar negeri dan pergerakan dari belahan bumi bagian barat tersebut. Upaya untuk mendominasi Amerika Latin telah dilakukan oleh beberapa blok kekuatan yang dimulai sejak masa kemerdekaan kolonialisme Eropa pada abad ke-19 dan di

awal abad ke-20, fasisme dan nazisme pada tahun 1930-an, dan komunisme sejak berakhirnya Perang Dunia II.⁷

Margareth Daly Hayes dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat tiga hal utama yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin, yaitu:

1. Kontribusi kawasan tersebut terhadap kepentingan keamanan Amerika Serikat.
2. Prospek dan kemampuan ekonomi Amerika Latin dalam menyediakan pasar bagi Amerika Serikat
3. Kepentingan politik Amerika Serikat.⁸

Selain itu, juga terdapat dimensi ideologi yang sangat penting dalam kebijakan Amerika Serikat yaitu keyakinan bahwa "Dunia Baru" harus didominasi, dipimpin dan dilindungi oleh Amerika Serikat tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara politik, budaya, dan moral. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan Amerika Serikat untuk mengisolasi, dan memproteksi seluruh belahan bumi bagian barat tersebut dari pengaruh kelompok lain khususnya Eropa.

⁷Jerome Slater & Jan Knippers Black, *United States Policy In Latin America: Latin America, Its Problems and Its Promise*, United States, Westview Press, 1991, h. 234

⁸Margareth Daly Hayes, *Latin America and the U.S. National Interest: A Basis for U.S. Foreign Policy*, United States, WestView Press, 1984, h. 4-5

2. Teori Persepsi

Untuk membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teori persepsi yang disampaikan K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis* (1988).

Menurut Holsti, setiap gambaran tujuan, pilihan di antara rangkaian tindakan, atau tanggapan terhadap situasi di lingkungan dapat dijelaskan sebagian dari sudut persepsi realitas para pembuat kebijakan. Orang (atau lembaga: negara, organisasi dll) bertindak dan memberi reaksi menurut citra mereka tentang lingkungan tersebut.⁹

Masih menurut Holsti, sistem nilai, kepercayaan yang dianut, dan pengetahuan mengenai fakta realitas tertentu dapat mempengaruhi persepsi sebuah negara dalam memberikan reaksi atau mengambil kebijakan terhadap realitas tertentu tersebut. Misalnya, Amerika Serikat sebagai negara *super power* berupaya melakukan isolasi terhadap Kuba, dengan cara menekan dan mengucilkannya melalui satu kebijakan embargo yang masih bertahan hingga saat ini. Dahulunya, kebijakan ini dirancang dan dijalankan oleh pemerintahan Amerika Serikat karena persepsi Amerika Serikat menganggap Kuba sebagai negara komunis, dan berpeluang menjadi ancaman secara ideologis.

Fakta dari kebijakan embargo yang dibuat oleh Amerika Serikat ternyata tidak mampu meruntuhkan rezim pemerintahan revolusi Kuba diambil sebagai bahan pertimbangan untuk sedikit melakukan perombakan terhadap kebijakan embargo tersebut. Kebijakan embargo Amerika Serikat terhadap Kuba ini

⁹K. J. Holsti, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis*, teri Jakarta Erlangga, 1988, h.

mengalami beberapa perubahan dalam beberapa periode pemerintahan Amerika Serikat. Perubahan yang berupa pengetatan ataupun memberikan keringan terhadap sanksi embargo tersebut melihat pada beberapa kesesuaian kepentingan antar kedua negara. Selain itu, tekanan yang datang dari dalam negeri baik itu dari masyarakat, media dan kelompok kepentingan juga mempunyai andil yang cukup kuat dalam penetapan meringankan ataupun mengetatkan embargo tersebut.

Pada saat ini, meskipun Amerika Serikat masih terus berupaya untuk ditegakkannya demokrasi di Kuba, tetapi persepsi mereka mengenai sistem pemerintahan komunis yang dianut oleh Kuba sudah sedikit bergeser. Pada saat ini mereka lebih melihat Kuba sebagai salah satu mitra bisnis yang strategis sejak ditemukannya beberapa titik eksplorasi minyak di Kuba yang menyimpan milyaran ton minyak mentah.

Atas dasar kepentingan dan kebutuhan dalam negeri Amerika Serikat inilah, pemerintah Barack Obama sedikit melakukan beberapa perubahan dalam upaya meringankan sanksi embargo yang diterapkan pemerintahan Amerika Serikat terhadap Kuba. Penulis melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Barack Obama ini merupakan langkah awal bagi perbaikan hubungan kedua negara. Jika kebijakan awal ini dinilai mampu berjalan dengan baik, maka penulis meyakini bahwa kebijakan ini mampu membuka pandangan masyarakat Amerika Serikat pada umumnya dan para pembuat kebijakan Amerika Serikat pada khususnya bahwa kepentingan dalam negeri mereka terhadap Kuba memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapat atas keinginan mereka untuk ditegakkannya demokrasi di Kuba.

E. Hipotesa :

Menurut penulis, hubungan antara Amerika Serikat – Kuba akan membaik jika dua faktor yang akan penulis angkat di dalam karya ilmiah ini dapat terpenuhi. Faktor-faktor tersebut adalah :

- I. *Political will* : Faktor ini merupakan faktor penetapan kebijakan berdasarkan keinginan ataupun tuntutan dari politik dalam negeri satu negara terhadap negara yang lainnya. Fokus penulis akan tertuju pada keinginan Amerika Serikat untuk ditegakkannya demokratisasi di Kuba. Dari keinginan Amerika Serikat tersebut, penulis akan membahas reaksi atau tanggapan Kuba, apakah *political will* Amerika Serikat tersebut sesuai dengan *political will* Kuba.
- II. Kesesuaian Kepentingan : Faktor ini berupa kesesuaian kepentingan yang diharapkan dapat terwujud dari masing-masing negara. Faktor ini lebih menggambarkan mengenai hubungan timbal balik secara langsung seperti *trading, traveling, tourism* dan kebijakan-kebijakan lainnya yang ditetapkan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama.

F. Tujuan Penelitian

Amerika Serikat – Kuba merupakan dua negara yang bertetangga yang berada di benua Amerika, akan tetapi kedua negara ini mempunyai hubungan yang sangat tidak harmonis sejak tahun 1959. Hingga saat ini Amerika Serikat

telah 10 kali melakukan pergantian presiden namun kebijakan luar negeri mereka atas Kuba tidak pernah menunjukkan adanya upaya untuk melakukan pembenahan hubungan kedepan. Dengan mengangkat judul **Prospek Hubungan AS – Kuba Pada Masa Pemerintahan Barack Obama** penulis bertujuan untuk mencoba memberikan gambaran bagaimanakah kelanjutan hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba selama beberapa tahun kedepan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai satu hasil yang spesifik dan terarah, pada penelitian ini penulis akan membatasi kajian mengenai prospek hubungan yang dilandasi atas dasar kepentingan dalam negeri kedua negara Amerika Serikat dan Kuba yang akan terjadi pada masa pemerintahan Barack Obama. Hubungan diplomasi politik yang terputus serta embargo perdagangan yang ditetapkan sejak tahun 1961 merupakan sejarah panjang perselisihan antara kedua negara ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* (deskriptif).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Pustaka

Diambil dari buku, majalah, koran, *website*, dan lain-lain.

¹⁰Noh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, h. 63.

BAB III KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA

Bab ini menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba. Selain itu, pada bab ini juga terdapat mengenai kepentingan Amerika Serikat atas kebijakan luar negeri yang mereka tetapkan terhadap Kuba. Poin terakhir pada bab ini menjelaskan *Political Will* Amerika Serikat atas Kuba.

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KUBA MENANGGAPI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah Kuba atas kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dengan struktur yang sama pada bab III, bab ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Kuba, poin-poin kesesuaian kepentingan dan *Political Will* Kuba.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian